



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 210 /A-02/ VI /TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 061/A-02/I/TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 128/A-02/IV/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, perlu disesuaikan dengan adanya penambahan judul Rancangan Peraturan Bupati dalam program pembentukan peraturan Bupati Luwu Timur, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
7. Keputusan Bupati Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 128/A-02/IV/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 061/A-02/I/TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Diktum I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 128/A-02/IV/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 ditambahkan 7 (tujuh) angka yakni angka 80 sampai dengan angka 91, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 210 /A-02/ VI /TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 061/A-
02/I/TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023	Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	BKAD	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
2	Penetapan dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023	Penetapan Rincian Dana Desa dan Penggunaan Dana Desa	√		Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN	BKAD	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
3	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa	Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	√		Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD, Bapelitbangda, Bapenda, Dinas PUPR, Disdagkop, Bagian Kesra	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
4	Perubahan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan kegiatan di Desa	Siltap dan tunjangan		√	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
5	Perubahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Unsur Masyarakat Desa Lainnya	Penyesuaian Biaya Transportasi dan lainnya		√	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/ Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
6	Pemekaran Dusun	Mekanisme pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun	√			Bagian Pemerintahan, Dinas dukcapil	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
7	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur	Beberapa inovasi	√		Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	Dinkes, Disdik, RSUD I La Galigo, RS Inco, Pengadilan Agama, Kemenag, PKK	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disdukcapil
8	Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Perangkat Daerah	Perubahan besaran sewa transportasi		√	-	Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
9	Analisis Standar Belanja	Besaran Anggaran untuk Kegiatan Fisik	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas PUPR, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
10	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	Penjabaran APBD	√		-	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
11	Verifikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Verifikasi Pertanggungjawaban	√		-	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
12	Penyertaan Modal	Penyertaan Uang	√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
13	Standar Harga Satuan	Standar harga	√		Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
14	Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo	Layanan Parkir		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Bapenda	Tahun 2023	Pemrakarsa: RSUD I La Galigo
15	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Daerah	Perubahan penetapan hasil perhitungan nilai sewa reklame sesuai indeks harga dan perkembangan perekonomian		√	Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame	DPMPTSP dan Satpol PP	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bapenda
16	Pemberian Pengurangan/ Pembebasan BPHTB bagi Penerima Sertipikat Program PTSL	Fasilitas pemerintah berupa Pemberian Pengurangan/ Pembebasan BPHTB bagi Penerima Sertipikat Program PTSL	√		Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis	Kementerian ATR/BPN dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bapenda
17	Rencana Kontijensi Gempa Bumi Tahun 2022-2024	Rencana Kontijensi Gempa Bumi	√		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Semua Perangkat Daerah	Tahun 2023	Pemrakarsa: BPPBD
18	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara		√	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Semua Penyelenggara Negara	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Hukum
19	Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata	Pendaftaran Usaha Pariwisata	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2021-2027	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disparmudora

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
20	Tata Cara Pembentukan Badan Promosi Pariwisata	Badan Promosi Pariwisata	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2021-2027	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disparbudora
21	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan	Penghargaan kepemudaan, pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan, dan organisasi kepemudaan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disparbudora
22	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	√		Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Diskominfo-SP
23	Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur	Acuan dalam Penanganan Perkara Hukum baik secara litigasi dan non litigasi	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	BKPSDM, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Hukum
24	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, dan standar pelayanan bantuan hukum	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Dinas Sosial dan P3A, dan BKAD	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Hukum

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
25	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara		√	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKAD	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Organisasi
26	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Badan Permusyawaratan Desa	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
27	Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	√		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Semua Perangkat Daerah	Tahun 2023	Pemrakarsa: Inspektorat
28	Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026	Standar Pelayanan Minimal	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Semua Perangkat Daerah	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
29	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
30	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Agromulyo Kecamatan Kalaena	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
31	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Arolipu Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
32	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bahari Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
33	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Balurejo Kecamatan Angkona	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
34	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
35	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
36	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
37	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
38	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
39	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
40	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kalaena Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
41	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
42	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karambua Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
43	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lampenai Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
44	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Madani Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
45	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Maliwoto Kecamatan Angkona	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
46	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
47	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
48	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mekar Sari Kecamatan Kalaena	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
49	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mulyasari Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
50	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
51	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
52	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rinjani Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
53	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Solo Kecamatan Angkona	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
54	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Kalaena	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
55	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
56	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tabaroge Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
57	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tadulako Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
58	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
59	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tarengge Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
60	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wanasari Kecamatan Angkona	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
61	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Watangpanua Kecamatan Angkona	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
62	Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Barang dan/atau Jasa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BKAD, BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
63	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BKAD, BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
64	Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Tarif Layanan Kesehatan	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BKAD, BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
65	Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Remunerasi	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BKAD, BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
66	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Tata Cara Kerja Sama	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
67	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Pedoman Pelaksanaan Anggaran	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
68	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Organisasi
69	Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	√		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKPSDM
70	Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	√		Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disdikbud
71	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah	Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah		√	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Kesejahteraan Rakyat
72	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	√		Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disdikbud

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
73	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		√	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
74	Kode Klasifikasi Arsip Daerah	Kode Klasifikasi Arsip	√		Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
75	Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Luwu Timur	Arsitektur Sistem Pemerintah	√		Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
76	Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Luwu Timur	Penyelenggaraan Sistem Pemerintah	√		Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
77	Pedoman Audit Ketaatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Audit Ketaatan pada Inspektorat	√		Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Inspektorat
78	Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pembentukan Produk Hukum Daerah		√	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Hukum

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
79	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	√		Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
80	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami	Penyertaan Modal	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami	Perumdam Waemami	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
81	Perubahan Atas Perbup Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan Akuntansi Properti Investasi		√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan PSAP 17 terkait Properti Investasi	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
82	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Masyarakat Desa serta Unsur Masyarakat Desa Lainnya	Biaya Perjalanan Dinas	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Pemerintah Desa	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
83	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Pendelegasian Kewenangan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMPSTP

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
	Pintu Kabupaten Luwu Timur							
84	Standar Operasional Prosedur Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur	Prosedur Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMPSTP
85	Standar Biaya Transportasi Lokal Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2023	Standar Biaya Transportasi Lokal	√		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023	BKAD, Puskesmas	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
86	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	√		Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Disdikbud	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Kesejahteraan Rakyat
87	Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Kabupaten Luwu Timur	Pengadaan Barang/Jasa	√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Perumdam Waemami, BKAD, Bagian PBJ	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Ekbang
88	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Organisasi

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
					sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah			
89	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Timur	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	√		Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Dinas Kominfo-SP	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Hukum
90	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Semua SKPD	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bapelitbangda
91	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Organisasi





PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

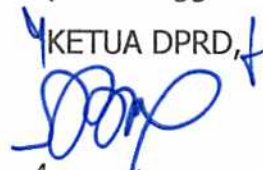
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Produk Hukum Daerah., sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 November 2022

KETUA DPRD,

ARIPIN

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bupati Luwu Timur di Malili
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
4. Ketua BAPEMPERDA di Malili
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 November 2022

KETUA DPRD,


ARIPIN

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bupati Luwu Timur di Malili
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
4. Ketua BAPEMPERDA di Malili
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2023.

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPA IAN	KETERANGAN
				BAR U	UBA H		NA	Penjela s an atau keterang an			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Luwu Timur	Mengubah Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 menyesuaikan dengan dinamika pembangunan, perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penataan ruang nasional	√	-	Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	√	-	Semua SKPD	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Ranperda Lanjutan)
2	Peraturan Daerah	Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Batas Usia Pernikahan Anak Usia 19 (Sembilan Belas) Tahun	√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan	√		1. Sekretariat Daerah 2. Satpol-PP	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Ranperda Lanjutan)

						Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak					
3	Peraturan Daerah	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Luwu Timur	√		Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	√		1. Dinas Sosial 2. BPKD 3. Satuan Pol-PP	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Sekretariat Daerah Bagian Hukum
4	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa	Perubahan status Desa, dan penghapusan ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.	√		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	√		1. Bagian Pemerintahan 2. Disdukcapil	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ranperda Lanjutan)
5	Peraturan Daerah	Pajak dan Retribusi Daerah	Pengaturan mengenai restrukturasi jenis pajak, sumber perpajakan daerah yang baru, tarif dan penyederhanaan jenis pajak dan retribusi	√		1. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	√		1. Sekretariat Daerah 2. Dinas PUPR 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4. Dinas Perikanan	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pendapatan Daerah

						2. UU Nomor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja			5. Dinas Perdagangan , koperasi, UKM dan perindustrian 6. DLH 7. DPKPP 8. DISHUB 9. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga 10. Dinas Kesehatan 11. DPMPTSP 12. kecamatan		
6	Peraturan Daerah	Naskah Hari Jadi Luwu Timur							1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Perpustakaan dan Kearsipan 3. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Triwulan I (Januari- Maret)	Pemrakarsa : DPRD
7	Peraturan Daerah	Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Luwu Timur TA. 2022				Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			Semua Perangkat Daerah	Triwulan II (Aprili-Juni)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Bagian Keuangan dan Aset Daerah

8	Peraturan Daerah	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah	√		Peraturan Presiden No.78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional	√		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan II (April-Juni)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Bagian Pemerintahan
9	Peraturan Daerah	Sistem Pertanian Organik		√		Permentan Nomor 64/Permentan/Qt .140/5/2013	√		1. Dinas Pertanian	Triwulan II (April-Juni)	Pemrakarsa : DPRD
10	Peraturan Daerah	Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Dan Rumput Laut	Pengaturan terkait Kelembagaan, Pendanaan dan Pembiayaan Pembudidayaan ikan dan rumput laut	√		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam	√		1. Dinas Perikanan	Triwulan II (April-Juni)	Pemrakarsa : DPRD

11	Peraturan Daerah	Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	√	-	1. Undang-undang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	√	-	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial P3A Satuan Pol-PP	Triwulan III(Juli-September)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur TA. 2023		√	-	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah	√	-	Semua SKPD	Triwulan IV (Oktober-Desember)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
13	Peraturan Daerah	Zonasi Nilai Jual Harga Tanah							1. DPKPP 2. BAPENDA 3. PUPR	Triwulan IV (Oktober-Desember)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : DPRD
14	Peraturan Daerah	Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona				Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan			1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Satuan Pol-PP	Triwulan IV (Oktober-Desember)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Bagian Pemerintahan Setdakab Luwu

								3. Camat Kalaena Camat Angkona		Timur
15	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024	Mengubah Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 menyesuaikan dengan dinamika pembangunan, perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penataan ruang nasional	√	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah			Semua SKPD	Triwulan IV (Oktober-Desember)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)

9 Ketua DPRD, 
 ARIPIN



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 373 /A-02/ X /TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 047/A-02/I/TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-02/I/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 231/A-02/VII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-02/I/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan dengan adanya penambahan judul Rancangan Peraturan Bupati dalam program pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-02/I/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-02/I/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 106/A-02/II/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-02/I/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 047/A-02/I/TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

Diktum I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-02/I/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 231/A-02/VII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-02/I/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, ditambahkan 11 (sebelas) angka yakni angka 69 sampai dengan angka 80, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 29 Oktober 2024

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 373/A-02/ X /TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 047/A-02/I/TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur	Acuan dalam Penanganan Perkara Hukum baik secara litigasi dan non litigasi	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	BKPSDM, Inspektorat	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Hukum
2	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, dan standar pelayanan bantuan hukum	✓		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Dinas Sosial dan P3A, dan BKAD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Hukum
3	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	✓		Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Tahun 2024	Pemrakarsa: Disdikbud

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
4	Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pembentukan Produk Hukum Daerah		✓	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	-	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Hukum
5	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah	Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah	✓		Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah	Disdikbud	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Kesejahteraan Rakyat
6	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Timur	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	✓		Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Dinas Kominfo-SP	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Hukum
7	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja	✓		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Organisasi

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
8	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Pelaksanaan penetapan masyarakat hukum adat	✓		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Disdikbud, Disparbudora, DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: DLH
9	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Pengelolaan Cadangan Pangan			Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur		Tahun 2024	Pemrakarsa: DisPKP
10	Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Sistem Kerja	✓		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Semua SKPD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Organisasi
11	Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Luwu Timur	Tata Cara Pemberian Penghargaan	✓		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Semua SKPD	Tahun 2024	Pemrakarsa: BKPSDM
12	Forum Investasi Batara Guru	Pembentukan Forum Investasi	✓		Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	Bapenda	Tahun 2024	Pemrakarsa: DPMPSTSP

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
13	Penyelenggaraan Pajak Daerah	Pajak Daerah	✓		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Semua SKPD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bapenda
14	Pengelolaan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah	✓		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Semua SKPD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bapenda
15	Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Jangka waktu penyimpanan dan penyusutan	✓		Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Semua SKPD	Tahun 2024	Pemrakarsa: DPK
16	Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Standar Pelayanan Perizinan	✓		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang		Tahun 2024	Pemrakarsa: DPMPPTSP
17	Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	Penganggaran dan Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2024	✓		Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	BKAD	Tahun 2024	Pemrakarsa: DPMD
18	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024	Penganggaran dan Penggunaan DD Tahun Anggaran 2024	✓		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa	BKAD	Tahun 2024	Pemrakarsa: DPMD

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
19	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa	Perubahan tunjangan perangkat desa, insentif kader di Desa dan honorarium			Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa	Pemerintah Desa	Tahun 2024	Pemrakarsa: DPMD
20	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa						Tahun 2024	Pemrakarsa: DPMD

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
21	Perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024						Tahun 2024	Pemrakarsa: DPMD
22	Perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024						Tahun 2024	Pemrakarsa: DPMD
23	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Tata cara pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur desa	✓		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		Tahun 2024	Pemrakarsa: DPMD
24	Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Perubahan indikator pembagian jasa pelayanan dan penambahan jasa tenaga yang berhak menerima jasa remunerasi				Bapelitbangda, BKAD, Bagian Ekbang	Tahun 2024	Pemrakarsa: BKAD
25	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit		✓				Tahun 2024	Pemrakarsa: Distransnaker

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
26	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja	✓			Bapelitbangda	Tahun 2024	Pemrakarsa: BKAD
27	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah	Perubahan Struktur Organisasi			Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah		Tahun 2024	Pemrakarsa: Satpol PP
28	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai			Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKAD, BKPSDM, Inspektorat, Bagian Hukum	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Organisasi
29	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lauwu	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
30	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lageo	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
31	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Burau	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
32	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Burau Pantai	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
33	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Putih	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
34	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cendana	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
35	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jalajja	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
36	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lumbewe	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
37	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lambarese	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
38	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kalatiri	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
39	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mabonta	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
40	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Asana	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
41	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Benteng	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
42	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lanosi	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
43	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bone Pute	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
44	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Laro	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
45	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lewonu	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
46	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lambara Harapan	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
47	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Balo-Balo	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
48	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lera	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
49	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cendana Hijau	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
50	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pepuro Barat	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
51	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Maramba	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
52	Pentapan dan Penegasan Batas Desa Kanawatu	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
53	Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah	Pembentukan OKKPD	✓		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	-	Tahun 2024	Pemrakarsa: DisPKP
54	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	✓		Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan	-	Tahun 2024	Pemrakarsa: BKAD
55	Persyaratan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	Prosedur Pencatatan PKWT/PKWTT	✓		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Dinas Transnaker	Tahun 2024	Pemrakarsa : Dinas Transnaker
56	Standar Harga Satuan Tahun 2024	Penetapan SHS Tahun 2024	✓		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Tahun 2024	Pemrakarsa: BKAD

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
57	Perubahan Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah	Perubahan penganggaran dan standar teknis Bantuan Stimulan Bedah Rumah		✓	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah	DPKPP	Tahun 2024	Pemrakarsa: DPKPP
58	Perubahan Atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah		✓	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	BKAD	Tahun 2024	Pemrakarsa: BKAD
59	Prosedur Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Eksploitasi dan Pekerja Anak Terintegrasi	Prosedur Penanganan Kasus Anak	✓		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak	Dinsos & P3A	Tahun 2024	Pemrakarsa: Dinsos & P3A
60	Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses	✓		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	DPK	Tahun 2024	Pemrakarsa: DPK
61	Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Penambahan Kategori Risiko, Kriteria Penilaian Risiko dan Selera Risiko	✓		Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Tahun 2024	Pemrakarsa: Inspektorat

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
62	Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pencegahan dan Investigasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Pedoman Kegiatan Pencegahan dan Investigasi	✓		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat	Tahun 2024	Pemrakarsa: Inspektorat
63	Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	Inspektorat	Tahun 2024	Pemrakarsa: Inspektorat
64	Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025	Pengaturan dan penetapan Analisis Standar Belanja	✓		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Tahun 2024	Pemrakarsa: BKAD
65	Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Pengaturan Manajemen Keamanan Informasi SPBE	✓		Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo	Tahun 2024	Pemrakarsa: Dinas Kominfo
66	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Perubahan Kelas Jabatan berdasarkan evaluasi Kemenpan RB		✓	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Organisasi

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
67	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perubahan lampiran terkait aset tetap dan reklas	✓		Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	BKAD	Tahun 2024	Pemrakarsa: BKAD
68	Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Towuti	Pengaturan RDTR Perkotaan Towuti	✓		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Dinas PUPR	Tahun 2024	Pemrakarsa: Dinas PUPR
69	Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Unsur Staf dan Badan Permusyawaratan Desa	Tunjangan Hari Raya	✓			BKAD	Tahun 2024	Pemrakarsa: DPMD
70	Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ujing Baru Kecamatan Tomoni	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
71	Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bayondo Kecamatan Tomoni	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
72	Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mandiri Kecamatan Tomoni	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
73	Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Lestari Kecamatan Tomoni	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
74	Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
75	Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni	Batas Desa	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
76	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah	Beasiswa Pascasarjana, Panitia Beasiswa		✓	Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah	Disdikbud, BKAD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
77	Penyelenggaraan PARIWISATA SEHAT	Persyaratan, sarana dan prasarana pariwisata sehat	✓			Dinas Kesehatan	Tahun 2024	Pemrakarsa: Disparmudora
78	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Harga pakaian dan atribut		✓	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	BKAD	Tahun 2024	Pemrakarsa: Sekretariat DPRD
79	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah	Nilai dan bentuk pengadaan		✓	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah	BKAD, Bagian PBJ, Perumdam Waemami	Tahun 2024	Pemrakarsa: Bagian Ekbang

NO.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
80	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain	Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD		✓	Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Inspektorat	Tahun 2024	Pemrakarsa: BKAD





PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Produk Hukum Daerah., sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 20 November 2023

KETUA DPRD,

ARIPIN



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bupati Luwu Timur di Malili
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
4. Ketua BAPEMPERDA di Malili
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur	Mengubah pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan, perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penataan ruang nasional	-	√	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	√	-	Semua Perangkat Daerah	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (Ranperda Lanjutan)

2	Peraturan Daerah	Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	-		1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	√	-	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial P3A 3. Satuan Pol-PP	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Ranperda Lanjutan)
3	Peraturan Daerah	Kabupaten Layak Anak	Mewujudkan Kabupaten yang Layak Bagi Kehidupan Anak	√		Peraturan Menteri P3A Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.	√		1. Gugus Tugas KLA 2. Save The Children 3. TP-PKK	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4	Peraturan Daerah	Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur TA.2023		√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	√		Semua Perangkat Daerah	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)

5	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Luwu Timur 2025-2045	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang	√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan	√		Semua Perangkat Daerah	Triwulan II (April-Juni)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
---	------------------	---	---	---	--	--	---	--	------------------------	--------------------------	---

						Rencana Kerja Pemerintah Daerah					
6	Peraturan Daerah	Penyandang Disabilitas	Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	√		Undang-Undang Nonor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	√		Dinsos P3A	Triwulan II (April-Juni)	Pemrakarsa : DPRD (Inisiatif)
7	Peraturan Daerah	Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona		√		Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan	√		1. Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 2. Satuan Pol-PP	Triwulan III (Juli- September)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Bagian Pemerintahan Setdakab
8	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019- 2039	Kawasan Peruntukan Industri dan Industri Unggulan Terintegrasi		√	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana		√	1. Bapelitbangda 2. Dinas PUPR	Triwulan III (Juli- September)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Disdagkop

						Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
9	Peraturan Daerah	Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Balita	Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi baru Lahir, Bayi dan Balita sehingga mampu mewujudkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dan berkualitas.	√			√		Dinas Kesehatan	Triwulan III (Juli-September)	Pemrakarsa : DPRD (Inisiatif)
10	Peraturan Daerah	Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren	Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pesantren yang mandiri	√			√		1. Kementerian Agama Luwu Timur 2. Dinas Pendidikan 3. Badan Kesbangpol 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Triwulan IV (Oktober-Desember)	Pemrakarsa : DPRD (Inisiatif)

11	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur 2024	Perubahan penganggaran untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan alokasi anggaran dari penyesuaian dengan prognosis anggaran	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	√		Semua Perangkat Daerah	Triwulan IV (Oktober-Desember)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
12	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2025	Perencanaan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	√		Semua Perangkat Daerah	Triwulan IV (Oktober-Desember)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)


 Ketua DPRD,

 ARIPIN



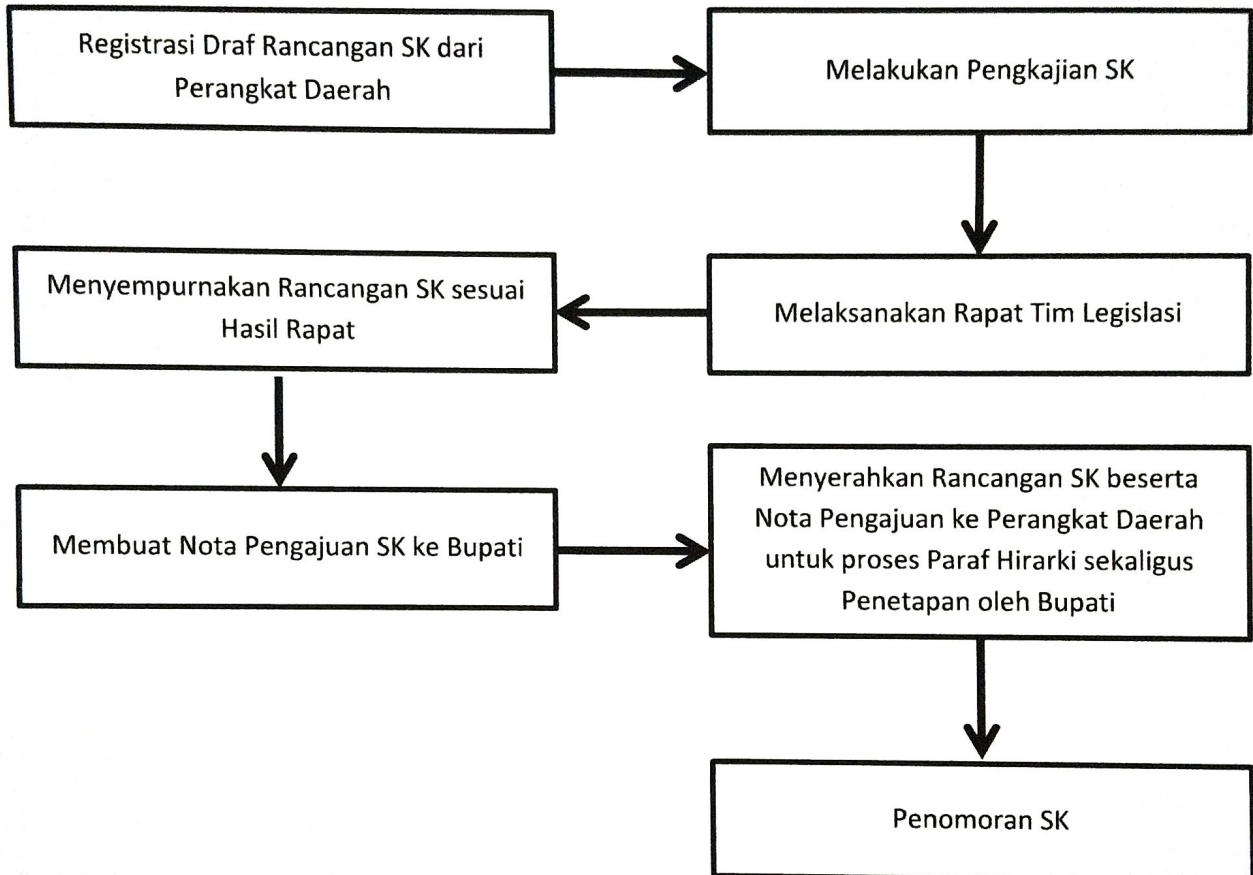
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Telepon : (0474) 321005 Faks : (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

TAHAP PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI
PADA BAGIAN HUKUM



KEPALA BAGIAN HUKUM,

YERISLIN WUALA, S.H.,M.Tr.AP

Pangkat : Pembina

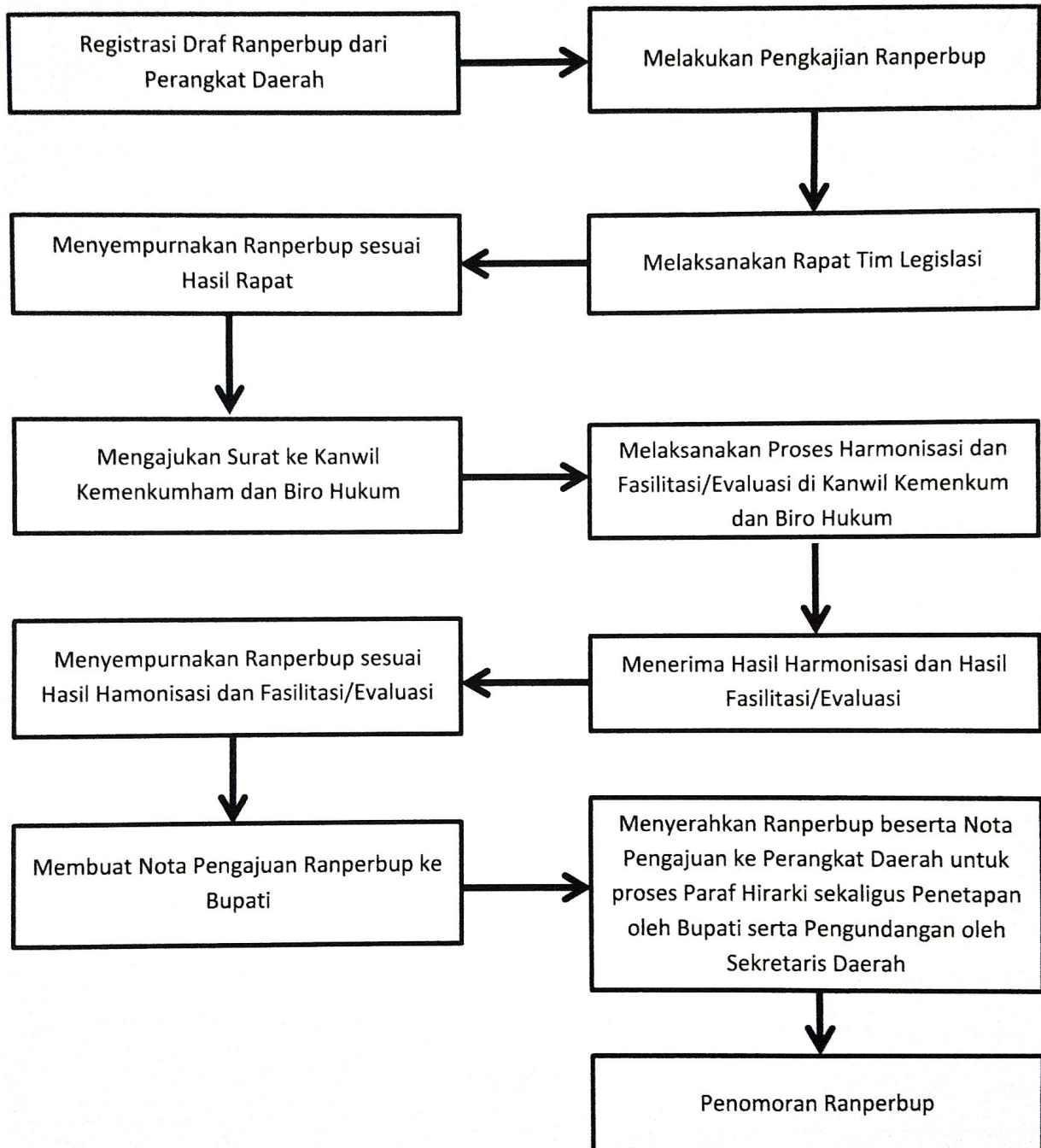
Nip. 19761213 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Telepon : (0474) 321005 Faks : (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

TAHAP PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA BAGIAN HUKUM



KEPALA BAGIAN HUKUM,

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.AP

Pangkat : Pembina

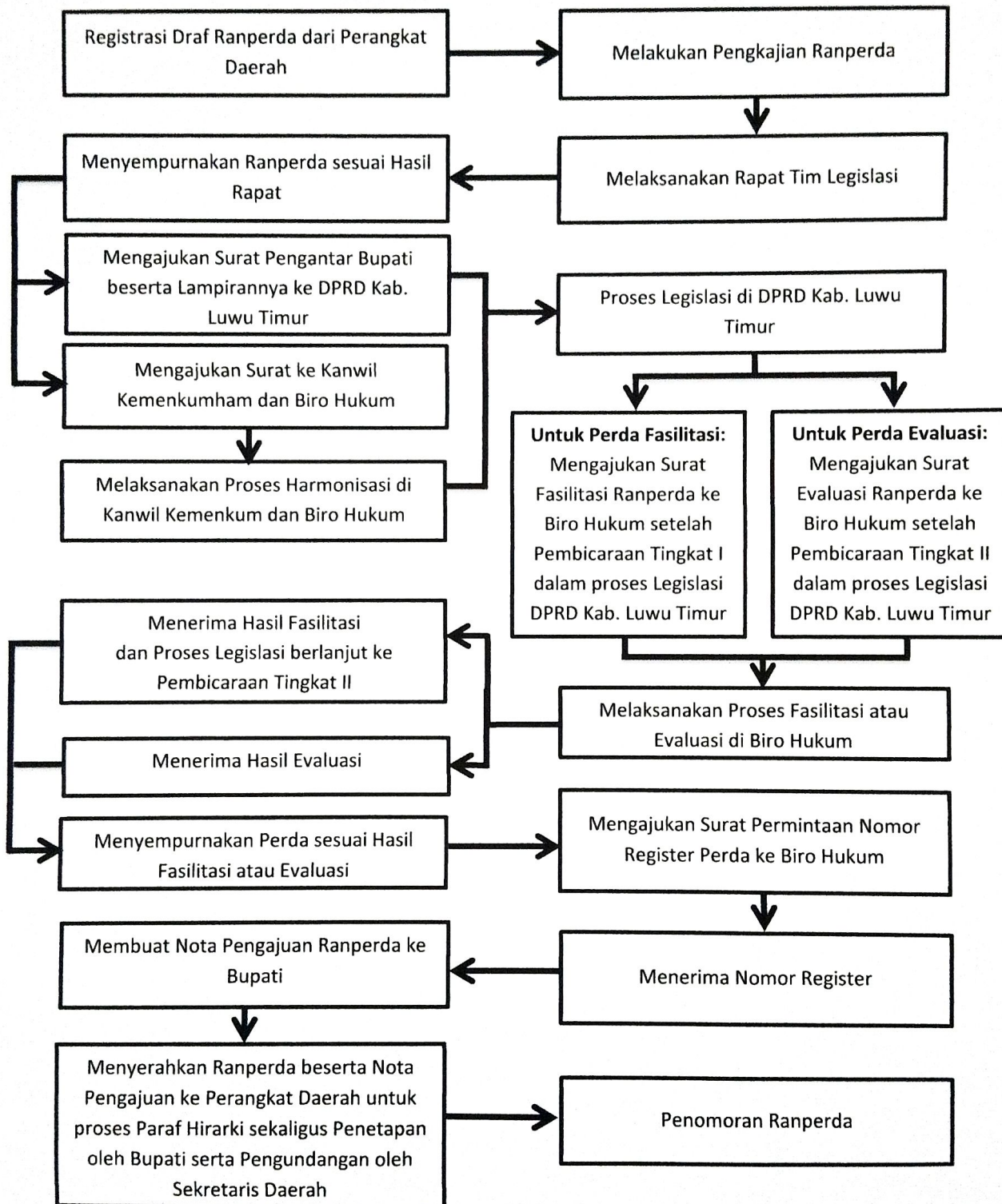
Nip. 19761213 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malli 92981 Sulawesi Selatan
Telepon : (0474) 321005 Faks : (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

TAHAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PADA BAGIAN HUKUM



KEPALA BAGIAN HUKUM,



YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.AP

Pangkat : Pembina

Nip. 19761213 200604 2 009